

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan**

##### **1. Syarat Pengajuan Pailit**

Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada hakekatnya menyatakan bahwa “debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan oleh permohonan krediturnya”. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, syarat-syarat pengajuan pailit terdiri dari:

- a. debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur
- b. tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktunya
- c. atas permohonan para krediturnya<sup>15</sup>

Pernyataan pailit diperiksa secara sumir bila dalam pengambilan keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti yang diatur dalam KUH Perdata apabila peristiwa tersebut telah terbukti dengan pembuktian sederhana.

---

<sup>15</sup>Amboro, Y. P. 2005. *Tinjauan Yuridis Mengenai Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*. Doctoral dissertation. Universitas Gadjah Mada.

Dalam hal kepailitan ini pernyataan pailit dapat dimohon oleh seorang atau lebih kreditur, debitur, jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Beberapa faktor pentingnya pengaturan tentang kepailitan dan PKPU untuk menghindari adanya :

- a. Perebutan harta debitur
- b. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya
- c. Kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditur dan debitur itu sendiri.<sup>16</sup>

## **2. Akibat Hukum dalam Kepailitan**

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru.<sup>17</sup> Dengan pailitnya pihak debitur, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

- a) Berlaku demi hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan

---

<sup>16</sup> Rahayu Hartini. 2017. *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Malang. Penerbit Setara Press. Hal.141

<sup>17</sup> Rahayu Hartini. 2007. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. Malang. Penerbit UMM Press. Hal. 103.

atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan.<sup>18</sup>

b) Berlaku secara rule of season

Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Beberapa akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur:

1. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan.<sup>19</sup>

2. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit

Semua barang dieksekusi dan hasilnya dikurangi biaya eksekusi dibagi-bagi di antara kreditur dengan mengingat hak-hak istimewa yang diakui oleh undang-undang.

3. Akibat hukum bagi kreditur

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama

---

<sup>18</sup> Munir Fuady. 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal.61-62.

<sup>19</sup> Sultan Remi Syahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillessementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta. Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti. Hal. 63.

atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang memenangkan hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Kreditur separatis

Merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditur separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.<sup>20</sup>

b) Kreditur preferen/istimewa

Adapun yang termasuk hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai, hipotek jaminan fidusia.

c) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur.

#### 4. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit

Menurut Pasal 31 UUK dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Jika dilihat, dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan. Menurut Pasal 33 UUK dan PKPU, apabila hari

pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit.<sup>21</sup>

#### 5. Akibat kepailitan bagi pasangan debitur pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Berdasarkan pada uraian-uraian diatas jelaslah bahwa meskipun seseorang telah dinyatakan pailit, orang tersebut masih mendapat perlindungan hukum. Dengan perkataan lain bahwa seseorang dinyatakan pailit masih dapat bertindak bilamana suatu tindakan yang ditujukan kepadanya akan mengakibatkan kerugian morilnya. Disamping itu pula, hal-hal yang membawa

---

<sup>21</sup> Tyassari. 2008. *Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pt. Dirgantara Indonesia (Persero)*. Tesis (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

keuntungan bagi harta hartamasih dapat dilakukan oleh si pailit, karena dengan keuntungan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat melunasi utang-utangnya yang sekaligus mempercepat proses pailit berakhir, dan selanjutnya pengembalian hak untuk mengurus harta kekayaan sendiri sebagaimana sebelum adanya pernyataan pailit.

### **3. Upaya Hukum dalam Kepailitan**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) UU Kepailitan, putusan pernyataan pailit terhadap debitor oleh pengadilan niaga mempunyai daya serta-merta. Akan tetapi, terhadap putusan itu, masih dapat diajukan upaya hukum.<sup>22</sup> Ketentuan ini ditunjukkan dalam Pasal 8 Ayat (7) UU Kepailitan, adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga

Setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor. Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas dengan dihadiri oleh panitera yang bertindak sebagai pencatat, debitor yang tidak boleh diwakilkan, kreditor atau kuasanya dan kurator. Hasil dari

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui serta piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka diselesaikan dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui atau dibantah Kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga.

Dalam praktiknya, kurator membacakan daftar tagihan didepan hakim pengawas, panitera pengganti, kreditor dan debitor beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan/ individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima/menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kurator. Kreditor yang merasa pembagian bagi dirinya tidak dapat disetujuinya maka dapat melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian piutang tersebut dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera Pengadilan Niaga, dengan menerima tanda bukti penerimaan selama tenggang waktu yang disediakan (Pasal 193 Ayat (1) UU Kepailitan). Surat keberatan tersebut harus dilampirkan oleh panitera Pengadilan Niaga pada daftar pembagian piutang yang disediakan di kepaniteraan (Pasal



193 Ayat (2) UU Kepailitan). Berdasarkan surat keberatan tersebut Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Para Kreditor Pelawan dan Kurator diberitahukan secara tertulis oleh juru sita mengenai penyediaan permohonan keberatan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 194 Ayat (3) UU Kepailitan). Berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (1) UU Kepailitan, kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama dua hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang pengadilan dengan ketentuan:

- (1) Piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
- (2) Salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
- (3) Dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.

Proses persidangan renvoi prosedur dalam proses kepailitan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sidang pembukaan, sidang pembuktian dan sidang putusan. Dalam proses persidangan kurator dan setiap kreditor atas kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya. Putusan renvoi prosedur

ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada sidang pertama atau paling lama tujuh hari kemudian (Pasal 194 Ayat (6) UU Kepailitan).<sup>23</sup>

a. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap daftar piutang dan kurator setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah permohonan kasasi (Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan). Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar alasannya (Pasal 196 Ayat (3) UU Kepailitan).

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI (Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan j.o. Pasal 13 UU Kepailitan).

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari

pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutuskan sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.<sup>24</sup>

#### c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.<sup>25</sup>

Ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UU Kepailitan. Alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2009). Namun, UU Kepailitan secara khusus mengatur alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2), yaitu:

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan. Selanjutnya panitera pengadilan menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung kepada panitera yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Kepaniteraan

Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## **B. Tinjauan Umum tentang BUMN Persero**

### **1. Karakter Hukum BUMN Persero**

Menurut Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, ada beberapa unsur yang menjadi suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN:

- a. Badan usaha;
- b. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara;
- c. Di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung;
- d. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Keterangan dari unsur-unsur di atas dapat penulis uraikan sebagai berikut :

#### **a. Badan Usaha**

Menurut Pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie van Toelichting (Penjelasan) Rencana Undang-Undang Wetboek van Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah

keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan untuk mengelola bisnis.

#### **b. Seluruh atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki oleh Negara**

Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51 % modal tersebut. Jika penyertaan modal negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut BUMN.

#### **c. Penyertaan Secara Langsung**

Mengingat di sini ada penyertaan langsung, maka negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).<sup>26</sup>

#### **d. Modal Penyertaan Berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan**

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

---

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*. FH UII Press. Yogyakarta. Hal. 8.



dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Melalui pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 jo Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 19 Tahun 2003, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal;
- c. kapitalisasi cadangan, kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan;
- d. sumber lainnya, termasuk dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi aset.<sup>27</sup>

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada

---

<sup>27</sup> Perhatikan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003.

hususnya, di sini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara;

- b. Mengejar keuntungan. Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 19 tahun 2003, meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 19 tahun 2003, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Mengenai pengertian Persero ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003. Pasal ini mendefinisikan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Berdasarkan definisi atas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:

- a. Persero adalah badan usaha;
- b. Persero adalah Perseroan Terbatas;
- c. Modalnya terbagi dalam saham;

d. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

## **2. Status Hukum Kekayaan BUMN Persero**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat kita temui konteks kata “Perseroan Terbuka” bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, bahwa BUMN Persero identik dengan PT. Dengan adanya hal itu maka segala hal yang menyangkut mengenai BUMN Persero adalah mengacu pada ketentuan yang mengatur PT.

Merujuk pada kekayaan BUMN yang pada hakekatnya bukan merupakan aset negara karena pada prinsipnya kekayaan tersebut telah dipisahkan dari harta kekayaan negara dalam hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diatur juga dalam Pasal 4 ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Modal daripada BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU BUMN. Dalam hal ini konteks kekayaan negara yang dipisahkan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didasarkan pada

prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dari situlah adanya transformasi status hukum dari uang negara menjadi uang privat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (6) serta Pasal 1 angka 10 UU BUMN seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa pembatasan hukum kekayaan negara sebagai badan hukum publik adalah perlu adanya pemisahan kekayaan negara untuk kemudian digunakan menjadi modal penyertaan berdirinya BUMN baik Perum maupun Persero yaitu dalam hal penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang adanya pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN dalam bentuk penyertaan modal secara langsung.<sup>28</sup>

Perubahan kepemilikan atas kekayaan negara yang semula kapasitasnya sebagai badan hukum publik yang mengelola uang publik menjadi badan hukum privat yang harus mengelola privat dengan mendasarkan pada ketentuan UU PT sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 UU BUMN beserta penjelasannya. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja dalam teorinya menyatakan tegas tentang adanya Transformasi Uang Publik ke dalam Uang Privat telah menyatakan adanya batas atau pembedaan yang tegas bahwa masing-masing konsep hukum tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sama satu sama lain.

---

<sup>28</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Secara terpisah hal ini menegaskan kembali kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan demikian segala konsekuensi yuridisnya maka status Negara sebagai pemilik modal kedudukannya hanya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Badan hukum sebagai subyek hukum mandiri yang dipersamakan dengan individu pribadi (pribadi hukum) adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang.<sup>29</sup> Sebagai badan hukum mempunyai konsekuensi: *Limited Liability, perpetual succession, Business property is owned by the company, The company has contractual capacity in its own right and can sue and be sued in its own name.*<sup>30</sup> Karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, Sendi-sendi Hukum Perdata, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal. 51.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

### 3. Kekayaan BUMN Persero dalam *Separate Legal Entity*

Seperti yang kita ketahui tentang karakteristik pada Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN) untuk itu seluruh sifat maupun karakter PT menjadi sifat Persero juga, dalam hal ini baik PT dan Persero memiliki kekhasan konsepsi kemandirian sebagai *separate legal entity*. Konteks *separate legal entity* yang melekat ini memberi pemahaman bahwa “penyertaan modal negara” dalam Persero merupakan kekayaan Persero, dan bukan lagi kekayaan Negara.

Disamping itu Undang-Undang perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni termaktub pada Pasal 1 angka 1, memberi penegasan kembali bahwa PT ditentukan sebagai badan hukum atau *legal entity* atau *rechtspersoon* yang dibedakan dari *natural person*. Ketentuan ini sangat penting sebab tidak semua badan usaha adalah badan hukum. Seperti halnya pada *Maatschap*, Perseroan Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah bukan badan hukum. Penyetoran status badan hukum diperoleh bila undang-undang telah secara tegas menetapkan akan hal itu.

Berdasarkan tradisi *Common Law*, karakteristik utama atas kedudukan Perseroan sebagai badan hukum mandiri adalah mengenai adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan Perseroan dengan kekuasaan para pemiliknya (*a major characteristic of the corporation is this distinction between the business and its owners*). Black's Law

Dictionary menyatakan bahwa *an entity, other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation*).<sup>32</sup>

Mendasarkan berdasarkan pada beberapa argumentasi tentang:

- a. Secara teoritis jelas bahwa kepemilikan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pemilik/pengurusnya merupakan karakteristik utama bagi eksistensi suatu badan hukum. Konsep demikian nantinya juga akan berkaitan dengan kemampuan badan hukum untuk menjalankan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan-perikatan yang diperbuat olehnya;
- b. Berdasarkan pada teori hukum perseroan terbatas jelaslah bahwa perseroan terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham. Konsep demikian berkaitan pula dengan tanggung jawab pemegang saham
- c. Yang terbatas hanya pada saham yang dimilikinya dalam perseroan. Melihat pendapat pakar hukum Erman Rajagukguk yang menyatakan bahwa sejatinya kekayaan negara yang terdapat dalam BUMN merupakan suatu bentuk kepemilikan

---

<sup>32</sup> Henry Campbell Black, 1990, Black's Law Dictionary with Pronunciations, St. Paul Minn: West Publishing Co. Hal. 985.



saham oleh negara dalam BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang keuangan negara. Mengenai hal ini sekiranya perlu dipahami prinsip - prinsip dasar hukum perseroan terbatas agar pada masa yang akan datang kekeliruan penafsiran atas kekayaan perseroan terbatas tidak terulang kembali.

d. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penanganan kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) pada PT. BRI (persero) Tbk., PT. Bank BNI (persero) Tbk., serta PT Bank Mandiri (persero), Tbk. Pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan yang dimiliki oleh bank BUMN bukan merupakan tagihan negara karena bank BUMN persero tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan terbatas. Berdasarkan pada fatwa ini maka dapat dikatakan bahwa harta kekayaan BUMN terpisah dari harta kekayaan negara.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Inda Rahadiyan. 2013. *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*. Yogyakarta. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 624 – 640. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal. 4

## **C. Tinjauan Khusus tentang Kurator**

### **1. Pengaturan dan Pengertian Kurator**

Kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat (5) adalah: Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan pemberesan harta debitor pailit di bawah perusahaan pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

### **2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) sangat jelas dikatakan sebagai berikut tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Secara garis besar dalam melakukan pemberesan harta kekayaan ada dua tahap yaitu :

#### **a. Tahap Pengurusan Harta Pailit**

Pengurusan dan pemberesan merupakan maksud yang berbeda menurut UU ini, dimana pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit.

- 1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi utangutang debitor pailit.

2) Mendata, melakukan penelitian terhadap asset dari debitor termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor kepada kreditor-kreditornya, sehingga kurator dapat mengambil langkah.

#### **b. Tahap Pemberesan Harta Pailit**

Yang dimaksud dengan pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.<sup>34</sup>

Kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukan dalam kepailitan.<sup>35</sup> Kemudian ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan pengangkatan kurator lain pada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator.

Terkait dengan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Andriani Nurdin berpendapat bahwa kewenangan kurator dapat berupa: “mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim Pengawas dan menyelamatkan harta pailit

---

<sup>34</sup> Joseph Adhi Makayasa Hulu. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Pelaksanaan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 7.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

meliputi seluruh harta debitor, membuat pencatatan atau menyusun inventaris harta pailit, dan melakukan penilaian atas harta pailit itu untuk disahkan oleh hakim pengawas, menyusun daftar utang dan piutang harta pailit, dan memberikan kepada para kreditor dan pihak lain salinan surat-surat yang diletakkan di kantornya dan yang dapat dilihat dengan bebas oleh umum”<sup>36</sup>

### **3. Tanggung Jawab Kurator**

- a. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tetap, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.
- b. Pada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitor.

---

<sup>36</sup> Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.